

SKRIPSI

**ELEKTABILITAS ANDI MUHAMMAD ILHAM RUSALI MASDAR DI
KECAMATAN POLEWALI PADA PEMILU DPR-RI TAHUN 2024**



SUKRAN

F0120505

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2024**

ABSTRAK

SUKRAN, F0120505, *Elektabilitas Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar Di Kecamatan Polewali Pada Pemilu DPR-RI Tahun 2024*. Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Pemerintah Daerah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Di bawah bimbingan Ibu Citra N. Farianty, S.IP, M.Si selaku dosen Pembimbing I dan bapak Taufik Ikhsan., S.IP., M.Si selaku dosen Pembimbing II.

Jumlah DPT di Pemilu 2024 naik karena jumlah pemilih yang baru mencapai usia 17 tahun, sehingga jumlah generasi muda meningkat. Bersamaan dengan banyaknya jumlah calon legislatif muda, salah satunya adalah Andi Muhammad Ilham yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, merupakan ketua DPC Gerindra Sulawesi Barat yang aktif dalam kelembagaan pemuda dan kemahasiswaan. Andi Ilham merupakan putra kedua dari Hj. Ruskati Ali Baal dan Ali Baal Masdar. Peneliti tertarik untuk mengetahui Bagaimana modalitas yang dimiliki oleh Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar mempengaruhi kemenangannya pada pemilihan umum tahun 2024, dengan menggunakan teori Modalitas politik Pierre Bourdieu (1986) yakni modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian mencapai kesimpulan bahwa; a) modal sosial yang dimiliki oleh Andi Ilham berfokus kepada kalangan generasi muda dengan menggunakan media sosial sebagai media sosialisasi dan kampanye, namun narasumber yang peneliti temui tidak mengetahui Andi Ilham; b) modal budaya dari Andi Ilham membantu ia untuk bersikap dengan baik di publik karena pendidikan formal dan pendidikan politik yang di dapat dari keluarga yang telah lama aktif dalam politik praktis; dan c) modal ekonomi yang disiapkan oleh Andi Ilham mampu untuk memenuhi kebutuhannya seperti, mengakomodasi sumber daya manusia, sosialisasi, kampanye sampai dengan akomodasi masyarakat yang hadir dalam kegiatan politiknya.

Kata kunci: Elektabilitas, Modalitas Politik, Pileg, Pemilu.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Setiap warga dan kelompok masyarakat dalam proses demokrasi memperoleh ruang untuk turut berpartisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaannya dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin sebuah pemerintahan. Politisasi (*politicization*) merupakan proses akuisisi kapital politik oleh suatu kelompok, institusi, atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dalam mencapai atau mempertahankan kekuasaan.

Pemilu pertama diselenggarakan pada, 29 September 1955 untuk memilih 272 anggota DPR. Kemudian pemilu kedua diselenggarakan pada, 15 Desember 1955 untuk memilih 542 anggota Dewan Konstituante, pemilu 1955 diikuti oleh lebih dari 30 partai politik (parpol) dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon *independent*. Pemilu tahun 1999 dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 merupakan pemilu ke 8 dan diikuti 48 parpol.¹ Pemilu 2004 terdiri atas pemilu legislatif yang dilaksanakan tanggal 5 April 2004 diikuti 24 parpol, serta untuk kali pertamanya memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilu

¹ Meiti Sudaina, “Sejarah Pemilu di Indonesia;” rri.co.id, 2022, <https://www.rri.co.id/pemilu/536062/sejarah-pemilihan-umum-di-indonesia>.

2009 diselenggarakan tanggal 9 April 2009 diikuti 44 partai politik, pemilu 2014 diselenggarakan pada 9 April 2014 diikuti 18 partai politik. Pada pemilihan umum 2019 diikuti oleh 16 partai politik dan pada pemilihan umum 2024 diikuti oleh 17 partai politik.²

Pemilihan Umum 2019 dan 2024 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Baik calon untuk legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota) maupun calon untuk eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota/Bupati dan Wakil Bupati)

Fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pemilihan umum harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih menonjol terhadap pengaruh figur kandidat. Untuk itu para kandidat mempunyai strategi untuk bisa memenangkan kontestan politik, semakin banyaknya modal seorang maka peluang untuk menang semakin besar.³

² Raja Malo Sinaga, "Sejarah Pemilu di Indonesia, Mulai 1955 hingga 2024," detikSumut, 2024 <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7172512/sejarah-pemilu-di-indonesia-mulai-1955-hingga-2024>.

³ Heri Budianto, Didik Haryadi Santoso, dan Novi Erlita, *Tantangan Komunikasi Politik Caleg Perempuan DPRD Provinsi DIY dalam Membangun Popularitas*, ed. oleh Didik Haryadi Santoso, Cetakan Pe (Depok: MBridge Press, 2020).

Jika mencermati prosedur maupun proses pemilihan di dalam pemilihan legislatif secara langsung, secara metafora kita bisa menggambarkan bahwa kontestasi itu ibarat balapan motor. Pasangan calon legislatif itu berkemungkinan memenangkan pemilihan umum secara langsung, memiliki tiga kombinasi di dalam berkendara, yakni adanya motor yang baik, sopir yang piawai, dan bensin yang memadai. Secara konseptual metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon yang akan mengikuti kontestasi dalam pemilihan umum. Ketiga modal itu adalah modal politik (*political capital*), modal sosial (*social capital*) dan modal ekonomi (*economical capital*), ketiga modal ini dapat mempengaruhi seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh.⁴

Modal yang dimiliki oleh calon akan mempengaruhi tingkat keterpilihan, yang disebut dengan elektabilitas. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan dari seorang pemilih. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer. Sedangkan elektabilitas calon legislatif

⁴ Giscka Canna Indira dan Chusnul Mariyah, "Analisis Modal Politik, Sosial, dan Ekonomi Terhadap Keterpilihan Caleg Perempuan Pemula pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2019," *TheJournalish: Social and Government* 2 (2021): 56–63

adalah tingkat keterpilihannya terbebas atau berkaitan dengan partai, namun yang paling penting adalah nilai yang dimiliki individu.⁵

Faktor figur dalam keterpilihan anggota DPRD merupakan faktor penting untuk menentukan kandidat calon anggota DPRD yang mencalonkan dirinya. Kualitas figur merupakan sebuah faktor penting dari masyarakat dalam menentukan sosok wakil rakyat yang mereka kehendaki. Figur bukan hanya mencakup popularitas calon anggota tersebut melainkan figur yang terbentuk dari perilaku sosial, integritas, pendidikan dan bisa juga dinilai karakter pribadi calon tersebut. Seorang calon legislatif harus mampu menjadi orang yang disukai oleh masyarakat luas. Kesukaan atau efek disukai merupakan bagian terpenting dari figur seorang calon legislatif.

Keterlibatan dari generasi muda dalam pemilihan umum sangat mempengaruhi jumlah suara karena jumlah partisipasi yang seharusnya tinggi. Generasi muda atau yang sering disebut dengan generasi milenial merupakan salah satu penentu dalam kontestasi pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2019. Arah politik dan pengaruh generasi milenial dalam pengambilan kebijakan terdapat tiga faktor, di antaranya adalah: (1) potensi partisipasi politik dan kematangan pilihan; (2) sensitifitas pada isu sosial dan kebijakan; (3) preferensi terhadap kandidat dan pilihan politik.⁶ Maka tidak heran jika

⁵ Mesy Supit, Marelien Lopian, dan trilke Tulung, "Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 (Studi Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kecamatan Bolaang Mongodow)," *Eksekutif* 2, no. 1 (2022): 1–10.

⁶ Fara Inka, Samsul Anwar, dan Latifah Rahayu, "Marcov Chain Analysis, Metode Alternatiff dalam Mengukur Tingkat Elektabilitas Peserta PEMILU Melalui Tagar: Studi Kasus Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2019," *Wacana Politik* 5, no. 1 (2020): 26–40.

banyak cara yang dilakukan oleh partai politik maupun calon anggota legislatif DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI untuk menarik simpati dari generasi muda

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional untuk pemilihan umum 2024 sebesar 204.807.222 jiwa. Dari jumlah itu, 52 persen di antaranya merupakan pemilih muda.⁷ Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan 9.917 orang masuk dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPR RI untuk Pemilu 2024. Dari 9.917 calon legislatif, ada 1.473 di antaranya berusia 21-30 tahun.⁸

Partai Gerindra merupakan salah satu partai yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif yang setiap periode kepemimpinan selalu meloloskan kadernya. Pada pemilihan tahun 2014 dan tahun 2019, Gerindra meloloskan Dra. Hj. Ruskati Ali Baal dua periode berturut-turut. Pada pemilihan tahun 2024, Dra. Hj. Ruskati Ali Baal selaku ketua DPD Gerindra Sulawesi Barat mengatakan akan fokus untuk menggalang tokoh masyarakat, aktivis kepemudaan. Partai Gerindra Sulawesi Barat optimis mempertahankan satu kursi DPR-RI dan memenangkan kursi DPRD provinsi. Sehingga dalam pencalonan DPR-RI Gerindra mengusung 3 calon yang merupakan figur dari 3 kabupaten di provinsi Sulawesi barat. Dengan mengandalkan Bakal Calon

⁷ Juli Hartoro, "Tetapkan DPT Pemilu 2024, KPU RI: 52 Persen Pemilih Muda," tempo.co, 2024, <https://pemilu.tempo.co/read/1743587/tetapkan-dpt-pemilu-2024-kpu-ri-52-persen-pemilih-muda>.

⁸ Anggi Muliaawati, "Bukan PSI, Ini Partai dengan Jumlah Caleg DPR Usia Muda Terbanyak," detikNews, 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-7018171/bukan-psi-ini-partai-dengan-jumlah-caleg-dpr-usia-muda-terbanyak>.

Legislatif (Bacaleg) milenial, Gerindra Sulbar yakin dapat mencapai target tersebut.⁹

Salah satu tokoh kepemudaan yang di dukung untuk maju ke senayan adalah Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar, yang merupakan ketua DPC Partai Gerindra Polewali Mandar serta putra dari pasangan Hj. Ruskati Ali Baal dan Ali Baal Masdar. Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar meraih gelar sarjana bidang administrasi publik di Universitas Brawijaya Malang. Ia merupakan Demisioner ketua IKMSBM (Ikatan Mahasiswa Sulbar Malang) periode 2017-2019 lalu menjabat sebagai ketua Karang Taruna Sulawesi Barat periode 2022-2027 yang dilantik pada 07 Mei tahun 2022.¹⁰

Komisi Pemilihan Umum menetapkan 985.760 orang sebagai Daftar Pemilih Tetap, yang mengalami kenaikan sebanyak 143.755 orang dibandingkan Pemilu 2019. Kenaikan tersebut dikarenakan jumlah pemilih yang baru mencapai usia 17 tahun meningkat. Untuk partai yang berpartisipasi di Pemilihan Umum tahun 2024 berjumlah 18 Partai Politik.¹¹ Andi Ilham yang menargetkan suara dari generasi muda tentu mendapat banyak tantangan karena dari 71 calon legislatif DPR RI yang ditetapkan hampir sebagian dari mereka berusia 21-30 tahun. Sehingga akan sulit untuk mengandalkan suara

⁹ Terassulbar, "Gerindra Sulbar Andalkan Bacaleg Milenial untuk Manangkan Pileg," Terassulbar, 2023, <https://terassulbar.com/2023/05/16/gerindra-sulbar-andalkan-bacaleg-milenial-untuk-manangkan-pileg/>.

¹⁰ Habluddin Hambali, "Ali Baal Masdar Lantik Putra Bungsunya Sebagai Ketua Karang Taruna Sulbar Periode 2022-2027," Tribunsulbar, 2022, <https://sulbar.tribunnews.com/2022/05/07/ali-baal-masdar-lantik-putra-bungsunya-sebagai-ketua-karang-taruna-sulbar-periode-2022-2027>.

¹¹ Antara, "KPU Sulbar tetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 985.760 orang," Antara, 2023, <https://makassar.antaranews.com/berita/489321/kpu-sulbar-tetapkan-dpt-pemilu-2024-sebanyak-985760-orang>.

dari generasi muda karena ada banyak calon lain juga yang memenuhi kualifikasi sebagai generasi muda.

Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar sebagai calon legislatif muda yang baru terjun dalam politik praktis dapat memperoleh kemenangan dengan menggunakan modalitas politiknya untuk meningkatkan elektabilitasnya dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024. Maka peneliti mengambil judul “Elektabilitas Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar Di Kecamatan Polewali Pada Pemilu DPR-RI Tahun 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengajukan pertanyaan, sebagai berikut:

Bagaimana modalitas yang dimiliki oleh Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar mempengaruhi kemenangannya pada pemilihan umum tahun 2024??

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh modalitas terhadap elektabilitas Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar pada pemilu legislatif tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Diharapkan nantinya mampu memberikan sebuah sumbangsih pemikiran serta menjadi bahan referensi untuk mahasiswa yang melakukan

penelitian yang sama dengan penulis mengenai elektabilitas dari calon legislatif dalam pemilihan umum.

b. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk mempertimbangkan pemanfaatan modalitas politik bagi pihak yang terkait dengan penelitian di kesempatan selanjutnya atau pihak lainnya yang ingin terlibat di kontestasi politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Teoritik

2.1.1. Modalitas Aktor Politik

Teori modal dicetuskan oleh Pierre Bourdieu, teori kapital ini erat kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Titik awal dalam membangun teori modal Bourdieu adalah pertanyaan tentang dominasi. Dalam masyarakat politik, masalah kekuasaan sebagai bentuk perwujudan kekuasaan menjadi masalah utama. Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial.

Menurut Bourdieu (1986), definisi modal ekonomi sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa.¹² Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materiil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk di cari dalam sebuah formasi sosial tertentu.

¹² Diryo Suparto, Sri Sutjiatmi, dan Akhmad Habibulah., “Analisis Modal Sosial Dalam kemenangan PILKADA Pemalang tahun 2020,” *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2022, 1–12.

Konsep Bourdieu tentang modal tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan yang lain, yakni habitus dan ranah. Modal habitus dan ranah merupakan serangkaian konseptual yang digunakan Bourdieu untuk menjawab tindakan sosial dalam konteks kekuasaan. Ranah dalam pengertian Bourdieu, adalah arena perjuangan dan kekuatan dari sebuah posisi dan otoritas yang legitimate. Kapital oleh Bourdieu dicirikan secara luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolis) serta kualitas-kualitas yang sangat penting secara sosial, seperti kemuliaan, status, dan otoritas (yang ditetapkan sebagai kapital perwakilan), serta kapital sosial (dicirikan sebagai preferensi halus dan desain pemanfaatan).

(HABITUS X MODAL) + RANAH = PRAKTIK

Habitus x modal + ranah = praktik merupakan kerangka teoritik dari Pierre Bourdieu. Dengan teori tersebut mempermudah untuk menganalisis modal-modal yang dimiliki ataupun digunakan para aktor politik atau yang terlibat dalam kontestasi tersebut. Habitus adalah produk masa lalu yang muncul setelah seseorang lahir dan setelah lama berinteraksi dengan masyarakat. Habitus adalah struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu relatif terhadap individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial. Sederhananya, habitus diwakili oleh skema, representasi konseptual objek dalam realitas sosial.¹³

¹³ Ansar Ansar, Muradi Muradi, dan Ferry Kurnia Rizkiansyah, "Pemanfaatan Modal Dedi Sitorus Sebagai Pemandang Baru Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Dapil Kaltara," *Perspektif* 11, no. 1 (2022): 16–24

Manusia menginternalisasi banyak skema sepanjang hidupnya, dan melalui skema ini mereka mempersepsi, memahami, menghargai, dan mengevaluasi realitas sosial. Menurut Bourdieu, ranah dipandang sebagai 'ranah kekuasaan'. Hal ini merupakan area dengan banyak potensi dan mengharuskan melihatnya secara dinamis. Konsep ini dibandingkan dengan hal-hal seperti "bingkai" dan aturan yang tidak relevan. Ranah adalah wilayah kekuasaan semi-otonom, dan juga wilayah dimana perebutan status berlangsung. Perjuangan ini dipandang sebagai transformasi atau mempertahankan ruang lingkup kekuasaan.¹⁴

Menurut Bourdieu, modalitas yang digunakan oleh aktor politik dalam kontestasi politik, sebagai berikut:

a) Modal ekonomi

Sumber daya yang dapat menjadi sarana produksi dan pendanaan. Modal ekonomi ini terdiri dari jenis modal dan dapat dengan mudah diubah menjadi bentuk modal lain. Modal ekonomi meliputi alat produksi (mesin, tanah, tenaga kerja), bahan (pendapatan dan barang), dan uang. Modal ekonomi ini direpresentasikan oleh konglomerat, kelompok entrepreneurship, maupun pejabat daerah. Para pengusaha dan pejabat yang mempunyai alat-alat produksi, buruh, uang dan juga tanah merupakan aset daerah yang sangat potensial. Aset-aset ini dapat digunakan untuk membangun kesejahteraan daerah, asalkan pengaturan

¹⁴ Suparto, Sutjiatmi, dan Habibulah., Loc.Cit.

sumber-sumber daya dan kekayaan alam daerah di atur secara adil dan legitimit.¹⁵

Modal ekonomi, menurut Bourdieu, memang dengan mudah dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang, dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Tetapi dalam kondisi tertentu modal budaya juga dapat dikonversikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat dilembagakan, seperti kualifikasi pendidikan. Demikian pula modal sosial dalam kondisi tertentu dapat dikonversikan ke dalam modal ekonomi dan bahkan dapat dilembagakan dalam bentuk gelar kesarjanaan.¹⁶

b) Modal budaya

Kualifikasi intelektual yang komprehensif yang dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau warisan keluarga, seperti kemampuan yang terlihat di depan umum, kepemilikan kekayaan budaya yang berkualitas, serta pengetahuan dan keterampilan khusus, pendidikan formal yang dihasilkan, sertifikat (gelar sarjana), dan lain-lain. Contoh lain dari modal budaya adalah kemampuan menulis, sikap, dan sopan santun yang berperan dalam menentukan status sosial. Dengan demikian, modal kultural merupakan sebuah representasi kemampuan intelektual, yang berkaitan dengan aspek logika.

¹⁵ *Ibid. hlm 50*

¹⁶ Indira dan Mariyah, Op.Cit., hlm 60

Ada banyak karya Bourdieu tentang isu-isu hubungan antara modal budaya, habitus salah satunya. Habitus adalah seperangkat preferensi atau disposisi yang dipelajari di mana seseorang berorientasi pada dunia sosial, habitus menghasilkan persepsi, aspirasi, dan praktik yang sesuai dengan sifat-sifat penataan dari sosialisasi sebelumnya. Pandangan dan definisi Bourdieu tentang habitus menunjukkan adanya penolakan pandangan objektivisme, subjektivisme, dan perilaku rasional.¹⁷

c) Modal sosial

Suatu jaringan hubungan sebagai sumber untuk menentukan status sosial. Modal sosial tercermin dari banyaknya jumlah aktivis, pekerja NGO, pekerja organisasi sosial, dan sebagainya. Modal sosial juga mempunyai jaringan dengan kutub-kutub kekuasaan baik di level nasional maupun level global. Modal sosial diperoleh dari relasi setiap agen yang saling mengenal dan saling mengakui. Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya, baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui.¹⁸

Dengan kata lain, dengan menjadi anggota dari suatu kelompok orang akan memperoleh dukungan dari modal yang dimiliki secara

¹⁷ *Ibid. hlm 61*

¹⁸ A. Mbolang, Frans Bapa Tokan, dan V. I A. Boro, "Modalitas Sosial Politik: Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) pada Pemilu Legislatif di Dapil V Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019," *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan* 1, no. 2 (2020): 181–98.

kolektif. Selanjutnya ia mengatakan bahwa besarnya modal sosial yang dimiliki seorang anggota dari suatu kelompok tergantung pada seberapa jauh kuantitas maupun kualitas jaringan hubungan yang dapat diciptakannya, serta seberapa besar volume modal ekonomi, budaya dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam jaringan hubungannya.

Modal sosial yaitu dukungan figur atau kandidat karena ketokohan sehingga menimbulkan kepercayaan (trust) dari masyarakat serta menciptakan interaksi sosial dan jaringan-jaringan yang akan mendukung. Modal sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya). Sejumlah aspek ini mesti dimiliki oleh setiap kontestan karena sangat berguna sebagai basis memobilisasi dukungan politik warga dan membangun modal sosial ¹⁹

Perbedaan mendasar modal sosial dari modal-modal lainnya adalah bahwa modal sosial bukanlah milik individu, tetapi muncul sebagai hasil dari hubungan individu. Modal sosial dapat terwujud di dalam kelompok-kelompok sosial yang paling kecil seperti keluarga tetapi juga dapat terwujud di dalam kelompok sosial yang paling besar seperti negara. Modal sosial diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme

¹⁹ Meriwijaya, Hendy Setiawan, dan Wihda Maulani, "Modalitas Politik Dalam Kemenangan Sunandar Di Pemilihan Peratin Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau Lampung Barat Tahun 2022," *Journal Of Social And Political Science* 3, no. 1 (2023): 165–82.

budaya, seperti tradisi dan kebiasaan-kebiasaan. Komunitas yang memiliki mekanisme pewarisan modal sosial substansial dalam bentuk aturan-aturan, biasanya menjadi komunitas dengan jaringan sosial yang kuat yang memungkinkan kerja sama sukarela. Kerja sama sukarela bisanya tercipta apabila tingkat partisipasi yang setara dan adil (*equal participation*) di dalam komunitas sudah terwujud.²⁰

2.1.2. Elektabilitas

Elektabilitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, diturunkan dari kata *elect* (memilih). Bentuk-bentuk turunan dari kata *elect* antara lain *election*, *electable*, *elected*, *electiveiness*, *electability* dan lain sebagainya. Elektabilitas dalam pemaknaan politik adalah tingkat keterpilihan suatu partai atau kandidat yang terkait dengan proses pemilihan umum.²¹

Menurut Dendy Sugiono elektabilitas adalah kemampuan atau kecakapan untuk dipilih menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan.²² Elektabilitas sebagai “kemampuan kandidat atau partai politik untuk memenangkan pemilihan berdasarkan dukungan yang diterima dari pemilih, partai politik, dan faktor-faktor lainnya. Elektabilitas meliputi: perilaku, pribadi, sikap dan persepsi. Perilaku berkaitan dengan tindakan–tindakan yang dilakukan, sedangkan pribadi dan sikap berkaitan dengan perasaan dan emosi, dan persepsi berkaitan dengan tingkat pengetahuan

²⁰ *Ibid.* hlm 87

²¹ Abdullah dan Cut Maya, “Menurunnya Elektabilitas Partai Politik LOKAL di Aceh (Studi Analisis Partai Aceh Pada Pemilihan Legislatif DPRA 2019),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 5, no. 1 (2020).

²² Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Jakarta, 2008).

yang dimiliki oleh manusia. Olehnya itu tingkat elektabilitas dapat diukur dengan memperhatikan unsur pengetahuan, sikap dan dukungan yang dimiliki oleh khalayak.²³

Pemerintah atau calon kandidat yang berelektabilitas akan didukung dan diterima oleh mayoritas masyarakat dengan sendirinya, karena masyarakat telah mengenal tokohnya dan memberikan kepercayaan penuh dan menilai bahwa kepentingan masyarakat dapat dilindungi oleh tokoh tersebut. Popularitas lebih banyak berhubungan dengan dikenalnya seseorang, baik dalam arti positif ataupun negatif. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Adakalanya berbalikan. Orang menjadi populer karena sering tampil di depan umum. Bagaimana dia tampil, merupakan persoalan lanjutan untuk menilai elektabilitasnya. Kalau tampilnya sebagai pelaku kriminal sebagai koruptor atau karena tindakan yang melanggar etika publik maka pengaruhnya terhadap elektabilitas tentu saja negatif.²⁴

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut

²³ Anang Anas Azhar, *Komunikasi Politik untuk Pencitraan (Konsep, Strategi dan Pencitraan Politik)*, ed. oleh Surya Adi Sahfutra, Cetakan 1 (Medan: PERDANA PUBLISHING, 2017).

²⁴ *Ibid.* hlm 9.

memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer. Sedangkan popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata publik.²⁵

Dalam politik, tak cukup hanya dengan populer saja, setelah itu kompetensi seseorang akan ambil bagian dalam meningkatkan elektabilitasnya dengan solusi dan caranya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada. Pendekatan kognitif berasal dari satu pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi. Menurut pandangan ini, dunia politik merupakan bauran dan interaksi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Kepentingan ini adalah kepentingan untuk memiliki dan mendapatkan kekuasaan.²⁶

Hubungan politik rasional melihat bahwa interaksi politisi atau partai politik dengan masyarakat penuh dengan alasan-alasan logis dan rasional. Menurut pandangan ini, masyarakat akan menilai dan memilih politisi atau partai politik yang program kerjanya paling rasional dan logis. Politisi atau partai politik melihat bahwa masyarakat adalah entitas yang rasional dan bisa berpikir. Sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah menyusun dan mengimplementasikan program kerja yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

²⁵ Agus Setiawan dan Sarah Amarissa Girsang, "Elektabilitas calon presiden: realitas atau penggiringan opini?," *Kajian Budaya dan Humaniora* 5, no. 2 (2023): 221–27.

²⁶ Supit, Lopian, dan Tulung, "Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 (Studi Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kecamatan Bolaang Mongodow)."

2.2 Penelitian Terdahulu

Kebaharuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah perubahan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Andi Ilham sebagai generasi muda untuk meningkatkan perolehan jumlah suara dari generasi muda, melalui penggunaan media sosial. Pencalonan dari Andi Ilham dilatar belakangi oleh usaha dari Partai Gerindra untuk melakukan adaptasi dengan perubahan dinamika pemilih dan rekam jejak anggota keluarga Masdar yang menjadi salah satu kekuatan politik besar di Sulawesi Barat. Andi Ilham secara spesifik menysar lembaga kepemudaan untuk terlibat dalam kampanyenya agar dapat menaikkan elektabilitas yang dimilikinya. Selain itu, Andi Ilham merupakan sosok yang baru dalam kontestasi politik praktis, pencalonannya merupakan kali pertamanya yang bersaing langsung dengan aktor-aktor politik yang telah lama berada di jabatan publik.

Penelitian terdahulu merupakan studi kepustakaan yang telah ada sebelumnya kepustakaan yang telah ada sebelumnya baik disertasi, skripsi jurnal maupun tesis yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan judul penelitian yaitu elektabilitas calon legislatif. Berikut adalah beberapa referensi yang memiliki kesamaan, yaitu:

Referensi pertama, Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta, dengan judul Elektabilitas Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kubu Raya oleh Ori Fahriansyah dan Syarif Usmulyadi. Penelitian menggunakan teori perilaku memilih (voting behavior), untuk melihat pilihan dari narasumber penelitian. Latar belakang penelitian adalah perbedaan yang

signifikan antara jumlah suara sah pemilihan presiden dengan suara sah pemilihan anggota legislatif. Penyebab dari rendahnya elektabilitas calon legislatif terindikasi atau diduga disebabkan oleh ketidakpercayaan (distrust), praktek politik uang pembelian suara (vote buying), dan rendahnya daya serap pemilih terhadap informasi sang calon.²⁷

Kesimpulan penelitian dari tiga alasan yang diasumsikan menjadi sebab rendahnya elektabilitas diketahui bahwa ada satu alasan yang sangat mempengaruhi yakni faktor informasi yang tersedia terbatas. Alasan lebih jelasnya disebabkan oleh; pertama, kurangnya informasi terkait calon legislatif di media sosial khususnya DPRD Kabupaten Kubu Raya. Kedua, ukuran alat peraga kampanye calon yang terpasang di pinggir jalan tidak cukup besar. Ketiga, jumlah alat kampanye calon yang jumlahnya cukup banyak namun terpampang secara serampangan dan kurang menarik perhatian. Keempat, format kertas suara yang hanya menampilkan nama calon yang jumlahnya banyak membuat para informan bingung dan memutuskan untuk tidak memilih.

Faktor rasa kecewa terhadap kinerja anggota DPRD. Faktor ini terkait dengan pengalaman memilih anggota DPRD yang sudah berkali-kali mereka lakukan dan berkali pula dibohongi. Penilaian seperti ini terkait dengan pilihan secara restrospektif. Dalam hal ini mereka menilai secara negatif pada calon anggota DPRD Kubu Raya. Pemilih seperti ini masuk dalam pendekatan

²⁷ Ori Fahriansyah dan Syarif Usmulyadi, "Elektabilitas Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kubu Raya," *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta* 5, no. 1 (2019): 75-97

rational choice dari sudut pandang politik. Faktor pembelian suara (*vote buying*) dengan harga tinggi. Faktor ini terkait dengan harga satu suara ditawarkan dengan harga yang tinggi mencapai 400 ribu persuara. Perilaku politik seperti ini terkait dengan kalkulasi untung rugi yang mana harapannya mendapatkan keuntungan tertinggi (*utility maximation*).

Referensi kedua, Jurnal Media Kom dengan judul Strategi Kampanye Calon Legislatif DPR RI Dalam Meningkatkan Popularitas Akseptabilitas Dan Elektabilitas Pada Pemilu DPR RI (Mohamad Saleh Caleg DPR RI Partai Golkar 2019- 2024) oleh Reonaldo Suryanata dan Heri Budianto. Teori yang digunakan menurut Dan Nimmo yakni komunikasi politik, penelitian seputar strategi kampanye, serta penggunaan media sosial. Pesan politik yang disampaikan dalam kampanye terdiri dari tiga komponen tujuan yakni, membangun suatu citra politik yang positif, membina pendapat umum ke masyarakat Bengkulu, dan mendorong adanya suatu partisipasi politik dalam pemilihan umum.²⁸

Kesimpulan dari penelitian yakni Mohamad Saleh bisa menang di pertarungan pemilu DPR RI karena mampu membaca strategi lawan politiknya/ kompetitor berasal dari mana sehingga Mohamad Sholeh bisa menentukan basis atau lokasi kampanyenya dan pernah menjabat sebagai ketua DPD yang berasal dari Provinsi Bengkulu sehingga tingkat kepercayaan masyarakat Bengkulu meningkat dan memilih M. Sholeh untuk duduk di

²⁸ Reonaldo Suryanata dan Heri Budianto, “Strategi Kampanye Calon Legislatif DPR RI dalam Meningkatkan Popularitas Akseptabilitas dan Elektabilitas pada Pemilu DPR RI (Mohamad Saleh Caleg DPR RI Partai Golkar 2019- 2024),” *Jurnal Media Kom* XI, no. 2 (2021): 164–69.

parlemen sebagai anggota DPR RI dengan perolehan suara 60.000 lebih dari Partai Golkar pada saat pemilu tahun 2019. Masyarakat Bengkulu sebagian besar sudah mengenali sosok Mohammad Saleh, sebagai anggota DPD RI, yang pada saat pemilu menjadi calon legislatif dari Partai Golkar. Sebelumnya beliau sudah duduk di Senayan sebagai anggota DPD RI, Dia kini berniat mewakili Provinsi Bengkulu ke DPR RI dengan bergabung bersama Partai Golkar. Pada saat menjabat sebagai anggota DPD RI, M Saleh ialah satu-satunya politisi dari Provinsi Bengkulu yang pernah menduduki jabatan sebagai Ketua DPD RI.

Referensi ketiga, Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora dengan judul Elektabilitas Calon Presiden: Realitas Atau Penggiringan Opini? oleh Agus Setiawan, Sarah Amarissa Girsang. Dalam konteks Indonesia, perhitungan elektabilitas calon Presiden dilakukan oleh media massa dengan menyampaikan informasi mengenai calon Presiden kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan popularitas calon Presiden dan juga memberikan informasi tambahan kepada masyarakat sebagai pertimbangan dalam memilih. Hasil elektabilitas ini juga sangat memengaruhi pilihan masyarakat yang memang belum bisa menentukan pilihannya.²⁹

Kesimpulan penelitian adalah elektabilitas calon presiden di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, elektabilitas mencerminkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap seorang calon. Calon presiden yang memiliki elektabilitas tinggi menunjukkan bahwa mereka berhasil

²⁹ Setiawan dan Girsang, "Elektabilitas calon presiden: realitas atau penggiringan opini?"

membangun citra yang kuat dan meraih kepercayaan dari sebagian besar pemilih. Kedua, elektabilitas juga memiliki implikasi langsung terhadap strategi kampanye dan pemilihan. Calon dengan elektabilitas tinggi cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan dukungan politik untuk mengorganisir kampanye yang efektif. Proses pengukuran elektabilitas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti metode survei, bias media, dan persepsi publik yang terkadang dapat mempengaruhi hasilnya. Meskipun hasil elektabilitas dapat mempengaruhi pemilihan, pemilih harus berhati-hati agar tidak hanya mengandalkan elektabilitas tanpa memahami visi dan program calon. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap agenda politik yang dapat memanipulasi opini.

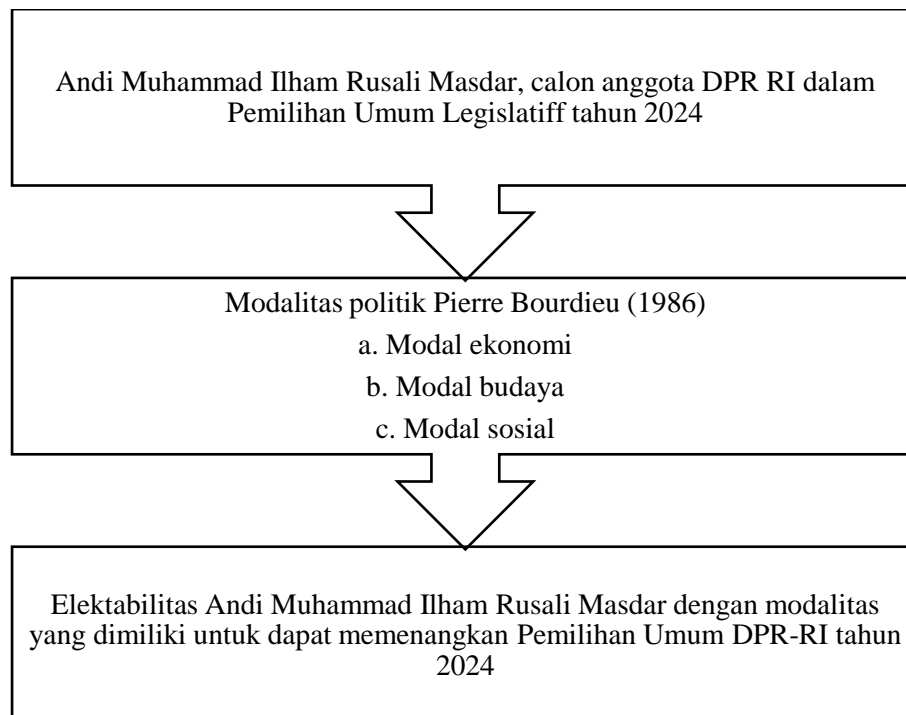
Berikut adalah perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

Penelitian sebelumnya			
Judul	Elektabilitas Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kubu Raya	Strategi Kampanye Calon Legislatif DPR RI Dalam Meningkatkan Popularitas Dan Akseptabilitas Dan Elektabilitas Pada Pemilu DPR RI (Mohamad Saleh Caleg DPR RI Partai Golkar 2019- 2024)	Elektabilitas Calon Presiden: Realitas Atau Penggiringan Opini?
Jurnal	Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta	Jurnal Media Kom	Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora
Tahun	2019	2021	2023

Peneliti	Ori Fahriansyah dan Syarif Usmulyadi	Reonaldo Suryanata dan Heri Budianto	Agus Setiawan, Sarah Amarissa Girsang
Persamaan	Tipe penelitian deskriptif kualitatif	Tipe penelitian kualitatif	Menggunakan <i>purposive sampling</i>
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> • Teori perilaku memilih (<i>voting behavior</i>) • Penentuan informan dengan <i>teknik snow ball</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Teori komunikasi politik • Tokoh politik yang diteliti merupakan <i>incumbent</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipe penelitian adalah studi literatur; • Teori komunikasi politik • Penelitian ini berada pada pemilihan presiden.

Tabel 2.1: penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut pemanfaatan modalitas yang dimiliki oleh Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar untuk dapat meningkatkan elektabilitas pada pemilihan umum tahun 2024, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa tersebut. Penggunaan penelitian kualitatif dipandang jauh lebih subyektif karena menggunakan metode yang berbeda dari mengumpulkan informasi, individu dalam menggunakan wawancara.³⁰

3.2 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan kunci ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, artinya peneliti dalam hal ini secara sengaja memilih dan menetapkan informan penelitian. Informan kunci ditetapkan berdasarkan kriteria kelayakan untuk memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian.³¹

Adapun informan yang telah saya wawancarai sebagai berikut:

No	Nama	Asal/jabatan
1	Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar	Ketua DPC Gerindra Polewali Mandar
2	Syahrir Hamadani	Wakil Ketua DPC Gerindra Polewali Mandar

³⁰ Syafrida Hafni, *Metode Penelitian*, ed. oleh Try Koryati (Jawa Timur: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021).

³¹ *Ibid.* hlm 43

3	Makmun Mustafa	Sekretaris DPC Gerindra Polewali Mandar
4	Pemuda	2 orang
5	Tokoh Masyarakat	2 orang

Tabel 3.1: Informan penelitian

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

a. Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan terhadap objek penelitian yaitu elektabilitas Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar pada pemilu legislatif tahun 2024 termasuk pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan anggota partai pengusung.

b. Wawancara

Peneliti telah melakukan wawancara dengan narasumber yang ditentukan dan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan untuk dapat mengetahui modalitas Andi Ilham dalam pencalonannya sebagai anggota DPR RI.

c. Studi Dokumen

Telaah pustaka atau *library research*, peneliti memanfaatkan data sekunder sebagai referensi dalam penelitiannya dengan menelaah sejumlah bahan literatur, buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah, internet, dan artikel. Pengumpulan data ini

tentu saja berhubungan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti sehingga mampu menunjang penelitian yang dilakukan.³²

3.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu:

a) Data Primer

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Andi Ilham sebagai objek penelitian, pengurus DPC partai Gerindra Polewali Mandar yang mengenal dekat sosok Andi Ilham sebagai bagian kepengurusan dan pemuda serta masyarakat yang menjadi sasaran dari calon legislatif.

b) Data Sekunder

Peneliti telah memperoleh informasi yang melengkapi penelitian melalui buku seperti AD/ART Gerindra, melalui website untuk mencari informasi terkait Andi Ilham sebagai objek penelitian terutamanya berkaitan dengan usaha atau progres yang dilakukan dalam pencalonannya.

3.5 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan analisis data kualitatif yang menggunakan pendekatan interpretatif serta kritis pada masalah sosial dan memfokuskan diri pada makna subjektifitas, pendefinisi, metapora, dan deskripsi pada kasus-kasus yang spesifik. Metode ini memberikan luasan ruang bagi peneliti untuk menempuh atau mengambil langkah-langkah non-linear

³² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

dan siklikal, terkadang melakukan upaya “kembali” pada langkah penelitian yang sudah ditempuh dalam menjalani proses penelitian.³³

3.6 Waktu penelitian

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dan berakhir pada bulan Februari 2024, penelitian dilakukan selama dua bulan sejak dimulainya pengurusan izin penelitian. Peneliti terlebih dahulu mengambil surat izin dan pengantar dari fakultas untuk dapat menjadi validasi keaslian dari penelitian. Peneliti mengambil surat izin penelitian dari dinas perizinan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pengurusan surat tersebut memakan waktu sekitar satu minggu.

3.7 Tempat Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar tepatnya kecamatan Polewali karena Andi Ilham sebelumnya merupakan ketua DPC Gerindra Polewali Mandar yang memang berdomisili di daerah tersebut maka potensi elektabilitas Andi Ilham lebih besar.

3.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian yang berjudul “Elektabilitas Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar Di Kecamatan Polewali Pada Pemilu DPR-RI tahun 2024”, yang akan diuraikan dalam 5 bab besar. Bab I akan berisi deskripsi mengenai latar belakang, seta gambaran mengenai Elektabilitas Andi Muhammad Ilham

³³ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, ed. oleh Muzakkir, Edisi Revi (PUSAKA ALMAIDA, 2020).

Rusali Masdar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. Selain itu, akan membahas memuat batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II akan berfokus mengenai telaah teori serta telaah teori mengenai penelitian ini. Di bagian ini juga dijelaskan segala proses dalam menganalisis kebijakan dan sumber referensi data awal penelitian sebagai tinjauan pustaka.

Bab III akan memberikan informasi terkait metode pelaksanaan penelitian, bagian ini berisi waktu dan tempat penelitian tipe penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan sampai dengan analisis data yang diperoleh.

Bab IV akan berisi gambaran umum terkait objek penelitian seperti gambaran umum Kabupaten Polewali Mandar, gambaran umum Pemilihan Legislatif DPR-RI, dan gambaran umum mengenai Partai Gerakan Indonesia Raya.

Bab V akan berisi hasil penelitian Elektabilitas Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 dengan menjawab pertanyaan yang telah dibuat yakni: Bagaimana modalitas yang dimiliki oleh Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar mempengaruhi kemenangannya pada pemilihan umum tahun 2024??

Bab VI merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, dan saran dari peneliti.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum keluarga Andi M. Ilham Rusali Masdar

Keluarga Masdar Pasmal yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah segenap jaringan keluarga yang memiliki hubungan darah dan hubungan terikat yang didasarkan pada perkawinan dan hubungan kekerabatan dengan Keluarga Masdar Pasmal dikhususkan dalam birokrasi pemerintahan. Latar belakang Keluarga Masdar Pasmal di Mandar dimulai dari Maraqdia Tapango, H.A Paselleri (1926) yang menikah dengan Hj. A. Sitti Tarattu (Maraqdia towaine Tapango) yang melahirkan putra tunggal Muhammad Darasa (HM Darasa), yang kemudian menggantikan ayahnya menjadi maraqdia Tapango. HM Darasa kemudian mempersunting Hj.Masyurah (Putri Andi Oddang Makkarumpa) yang melahirkan putra tunggal yang diberi nama Masdar Pasmal. Nama ini terambil dari kata Mas (Masyurah) dan Dar (Darasa). Pas dari nama Paselleri dan Mar dari nama Makkarumpa.³⁴

Masdar Pasmal kemudian menggantikan ayahnya menjadi maraqdia Tapango, ia juga pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Polmas (sekarang Polman) tahun 1999-2003 (Bupati saat itu Hasyim Maggabarani; masih bersepepu dengan Masdar Pasmal). HM Masdar Pasmal mempersunting H.A Suriani Pasilong, putri dari pasangan A. Pasilong (paqbicara Kaiyyang Kerajaan Balanipa) dan Hj.Sitti Hadara Puang towaine.

³⁴ Ulandari Fadillah dan Hasrat Arief, "Analisis Peran Keluarga Masdar Pasmal dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2014): 33–48.

Pasangan Andi Pasilong dan Hj. Sitti Hadara dikaruniai dua putra dan tiga putir yakni : Andi Patajangi pasilong (mantan Camat Campalagian), Andi Suryani Pasilong (istri Masdar Pasmars), Andi Saad Pasilong (mantan bupati polmas), Hj. Andi Nuraeni Pasilong (manta camat Tinambung) dan Hj. Andi Hebawaty Pasilong (Istri mantan wakil bupati majene Alm. Andi Sulaiman Balimalipu). Mereka adalah cucu dari Laju Kanna Doro Arajang Balanipa ke-50. Perkawinan antara Masdar Pasmars dan H.A Suriani Pasilong dikaruniai enam putra dan dua putri. Andi Ali Baal MP, Andi Ibrahim MP, Andi Nursami MP, Andi Baso MP (almarhum), Andi Irwan MP, Andi Kufliaty MP (almarhum), dan Andi Masri MP. Jaringan keluarga inilah yang menunjukkan perannya dalam ranah politik pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar.

Andi M. Ilham Rusali Masdar, S.A.P., M.Han menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang Administrasi Publik di Universitas Brawijaya, Malang. Lalu Andi Ilham menyelesaikan pendidikan magisternya di Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Sehingga setelah proses pendidikannya selesai, Andi Ilham baru memulai karier politiknya di Sulawesi Barat. Andi Ilham merupakan demisioner ketua IKMSBM (Ikatan Mahasiswa Sulbar Malang) periode 2017-2019, lalu saat ini menjabat sebagai ketua Karang Taruna Sulawesi Barat periode 2022-2027.

Andi M. Ilham Rusali Masdar, S.A.P., M.Han merupakan putra kedua dari Hj. Ruskati Ali Baal dan Ali Baal Masdar. Ayah dari Ali Baal Masdar yakni Andi Masdar Pasmars, pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten

Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar) pada periode 1999-2003. Sedangkan ibunya, Andi Suryani Pasilong berasal dari keluarga bangsawan di Sulawesi Barat. Andi Ruskati Radjab yang merupakan ibunda Andi Ilham pernah menjadi anggota komisi VIII DPR-RI periode 2014-2019.³⁵

Berdasarkan catatan LHKPN Ali Baal Masdar memiliki harta kekayaan mencapai Rp60.780.838.653. Harta kekayaan yang dimiliki oleh Ali Baal Masdar terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp7.650.446.000, selain itu juga Ali Baal tercatat memiliki harta bergerak sebesar Rp350.215.000, surat berharga senilai Rp50.000.000.000. Serta tercatat memiliki kas dan setara mencapai sebesar Rp2.780.177.653.³⁶

4.2 Gambaran Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

1.2.1 Sejarah pembentukan dan berdirinya Partai Gerindra

Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang mendambakan Indonesia yang bangun jiwanya, dan bangun badannya. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang. Partai ini terbentuk atas adanya gagasan dari perbincangan antara Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo pada November 2007 lalu. Partai ini memiliki tujuan dan fungsi yang mengedepankan adanya pengamalan Pancasila dan

³⁵ Samad Banniq, "Putra Kedua Gubernur Sulbar Raih Gelar Sarjana di Unibraw Malang," BANNIQ.Id.Malang, 2020, <https://banniq.id/putra-kedua-gubernur-sulbar-raih-gelar-sarjana-di-unibraw-malang/>.

³⁶ Putri Nurcahyani, "Inilah Gubernur Terkaya di Sulawesi, dari Punya Koleksi Mobil Seharga Rp2 M hingga Juragan Tanah," KLIKPENDIDIKAN.ID, 2023, <https://www.klikpendidikan.id/ekonomi-bisnis/3589718378/inilah-gubernur-terkaya-di-sulawesi-dari-punya-koleksi-mobil-seharga-rp2-m-hingga-juragan-tanah?page=2>.

penegakan Undang-undang Dasar 1945. Dalam suatu diskusi yang telah melahirkan suatu partai, dengan berbagai pertimbangan, partai ini diberi nama Partai Gerakan Indonesia raya dengan lambang kepala burung garuda dan dideklarasikan pada 6 Februari 2008.³⁷

Perbincangan mengenai nasib bangsa ini kemudian menjadi gagasan berdiri partai Gerindra yang saat itu baru diwacanakan di kalangan Hashim dan Prabowo. Berdirinya partai ini pun juga mendapat penolakan dari beberapa orang yang tidak ingin terlibat dengan pembuatan parpol baru. Perdebatan yang cukup panjang tersebut akhirnya menghasilkan perjuangan demi kesejahteraan rakyat yang memiliki 6 prinsip dasar partai (Prinsip Disiplin, Prinsip Kedaulatan, Prinsip Kemandirian, Prinsip Persamaan Hak, Prinsip Kerja sama dan Gotong Royong dan Prinsip Musyawarah) dan juga 16 pokok-pokok perjuangan partai Gerindra. Maka dengan semangat kemandirian, keberanian, dan kemakmuran rakyat, Partai Gerindra memilih nama Gerakan Indonesia merdeka dan kepala Garuda sebagai perwujudan niat dan komitmen mereka terhadap manifesto Gerakan Indonesia Rayanya.³⁸

1.2.2 Visi dan Misi Partai Gerindra

- a. Visi Partai GERINDRA adalah menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan

³⁷ DPP Partai Gerindra, "Sejarah Partai Gerindra," Gerindra, 2022, <https:// Gerindra.id/sejarah-partai-gerindra/>.

³⁸ DPP Partai Gerindra, "Sejarah Partai Gerindra," Gerindra, 2022, <https:// Gerindra.id/sejarah-partai-gerindra/>.

religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

- b. Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai GERINDRA mengemban misi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain:
 - a) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
 - b) Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
 - c) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.³⁹

1.2.3 Tujuan Partai Gerindra

- a) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, secara murni dan konsekuen.

³⁹ Gerindra, *Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 2020* (Jakarta: Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), 2020).

- b) Berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
- c) Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila, yang menjunjung tinggi kejujuran dan menghormati kebenaran, hukum dan keadilan.
- e) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarah pada kedaulatan bangsa yang berdikari.
- f) Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju, modern, sejahtera, kuat dan berdaulat.⁴⁰

4.3 Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI Sulawesi Barat

Pada pemilihan umum legislatif anggota DPR RI Sulawesi Barat pada tahun 2009, berikut:

No.	Nama	Nama Partai
1.	H. Hendra S Singkarru, SE	Partai Amanat Nasional
2.	Drs. H. Ibnu Munzir	Partai Golongan Karya

⁴⁰ *Ibid. hlm 17*

3.	Mayjen TNI (PURN) Salim Mengga	Partai Demokrat
----	--------------------------------	-----------------

Tabel 4.1: perolehan suara pada pemilihan legislatif DPR-RI 2009-2014

Pada pemilihan umum legislatif anggota DPR RI Sulawesi Barat pada tahun 2014, berikut:

No.	Nama	Nama Partai	Jumlah suara
1.	Hj. Enny Anggraeny Anwar	Golongan Karya	58.518
2.	Dra. Hj. Ruskati Ali Baal	Partai Gerakan Indonesia Raya	55.018
3.	Mayjen TNI (PURN) Salim Mengga	Partai Demokrat	51.168

Tabel 4.2: perolehan suara pada pemilihan legislatif DPR-RI 2014-2019

Selanjutnya pada pemilihan umum legislatif untuk anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Barat tahun 2019, sebagai berikut:

No.	Nama	Nama Partai	Jumlah suara
1.	H. Arwan M. Aras T, S.Kom	PDI P	86.910
2.	Dra. Hj. Ruskati Ali Baal	Partai Gerakan Indonesia Raya	72.75
3.	Dr. H Suhardi Duka, MM	Partai Demokrat	64.817
4.	Ratih Megasari Singkaru, MSc	Partai Nasional Demokrat	30.946

Tabel 4.3: perolehan suara pada pemilihan legislatif DPR-RI 2019-2024

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Azhar, Anang Anas. *Komunikasi Politik untuk Pencitraan (Konsep, Strategi dan Pencitraan Politik)*. Disunting oleh Surya Adi Sahfutra. Cetakan 1. Medan: PERDANA PUBLISHING, 2017.
- Budianto, Heri, Didik Haryadi Santoso, dan Novi Erlita. *Tantangan Komunikasi Politik Caleg Perempuan DPRD Provinsi DIY dalam Membangun Popularitas*. Disunting oleh Didik Haryadi Santoso. Cetakan Pe. Depok: MBridge Press, 2020.
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta, 2008.
- Gerindra. *Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 2020*. Jakarta: Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), 2020.
- Hafni, Syafrida. *Metode Penelitian*. Disunting oleh Try Koryati. Jawa Timur: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021.
- Saat, Sulaiman, dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Disunting oleh Muzakkir. Edisi Revi. PUSAKA ALMAIDA, 2020.

Jurnal

- Ansar, Ansar, Muradi Muradi, dan Ferry Kurnia Rizkiansyah. "Pemanfaatan Modal Dedi Sitorus Sebagai Pendaftar Baru Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Dapil Kaltara." *Perspektif* 11, no. 1 (2022): 16–24. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5250>.
- Abdullah, dan Cut Maya. "Menurunnya Elektabilitas Partai Politik LOKAL di Aceh (Studi Analisis Partai Aceh Pada Pemilihan Legislatif DPRA 2019)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 5, no. 1 (2020).
- Fadillah, Ulandari, dan Hasrat Arief. "Analisis Peran Keluarga Masdar Pasmard dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2014): 33–48.
- Fahriansyah, Ori, dan Syarif Usmulyadi. "Elektabilitas Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kubu Raya." *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta* 5, no. 1 (2019): 75–97. <https://doi.org/10.52447/polinter.v5i1.2299>.
- Indira, Giscka Canna, dan Chusnul Mariyah. "Analisis Modal Politik, Sosial, dan Ekonomi Terhadap Keterpilihan Caleg Perempuan Pemula pada Pileg DPRD

DKI Jakarta 2019.” *TheJournalish: Social and Government* 2 (2021): 56–63.
<http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>.

Inka, Fara, Samsul Anwar, dan Latifah Rahayu. “Marcov Chain Analysis, Metode Alternatiff dalam Mengukur Tingkat Elektabilitas Peserta PEMILU Melalui Tagar: Studi Kasus Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2019.” *Wacana Politik* 5, no. 1 (2020): 26–40.

Mbolang, A., Frans Bapa Tokan, dan V. I A. Boro. “Modalitas Sosial Politik: Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) pada Pemilu Legislatif di Dapil V Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019.” *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan* 1, no. 2 (2020): 181–98.

Meriwijaya, Hendy Setiawan, dan Wihda Maulani. “Modalitas Politik Dalam Kemenangan Sunandar Di Pemilihan Peratin Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau Lampung Barat Tahun 2022.” *Journal Of Social And Political Science* 3, no. 1 (2023): 165–82.

Setiaman, Agus, dan Sarah Amarissa Girsang. “Elektabilitas calon presiden: realitas atau penggiringan opini?” *Kajian Budaya dan Humaniora* 5, no. 2 (2023): 221–27.

Suparto, Diryo, Sri Sutjiatmi, dan Akhmad Habibulah. “Analisis Modal Sosial Dalam kemenangan PILKADA Pemalang tahun 2020.” *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2022, 1–12.

Supit, Mesy, Marelien Lopian, dan trilke Tulung. “Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Anngota Legislatif Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 (Studi Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kecamatan Bolaang Mongodow).” *Eksekutif* 2, no. 1 (2022): 1–10.

Suryanata, Reonaldo, dan Heri Budiarto. “Strategi Kampanye Calon Legislatif DPR RI dalam Meningkatkan Popularitas Akseptabilitas dan Elektabilitas pada Pemilu DPR RI (Mohamad Saleh Caleg DPR RI Partai Golkar 2019-2024).” *Jurnal Media Kom XI*, no. 2 (2021): 164–69.

Website

Antara. “KPU Sulbar tetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 985.760 orang.” Antara, 2023. <https://makassar.antaranews.com/berita/489321/kpu-sulbar-tetapkan-dpt-pemilu-2024-sebanyak-985760-orang>. Di akses pada tanggal 01 Februari 2024.

Banniq, Samad. “Putra Kedua Gubernur Sulbar Raih Gelar Sarjana di Unibraw Malang.” BANNIQ.Id.Malang, 2020. <https://banniq.id/putra-kedua-gubernur-sulbar-raih-gelar-sarjana-di-unibraw-malang/>. Diakses pada tanggal 28 April 2024.

DPP Partai Gerindra. “Sejarah Partai Gerindra.” Gerindra, 2022. <https://gerindra.id/sejarah-partai-gerindra/>. Diakses pada tanggal 07 Februari 2024.

- Hambali, Habluddin. "Ali Baal Masdar Lantik Putra Bungsunya Sebagai Ketua Karang Taruna Sulbar Periode 2022-2027." Tribunsulbar, 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/05/07/ali-baal-masdar-lantik-putra-bungsunya-sebagai-ketua-karang-taruna-sulbar-periode-2022-2027>. Diakses pada tanggal 01 Februari 2024.
- Hartoro, Juli. "Tetapkan DPT Pemilu 2024, KPU RI: 52 Persen Pemilih Muda." tempo.co, 2024. <https://pemilu.tempo.co/read/1743587/tetapkan-dpt-pemilu-2024-kpu-ri-52-persen-pemilih-muda>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2024.
- Muliaawati, Anggi. "Bukan PSI, Ini Partai dengan Jumlah Caleg DPR Usia Muda Terbanyak." detikNews, 2023. <https://news.detik.com/pemilu/d-7018171/bukan-psi-ini-partai-dengan-jumlah-caleg-dpr-usia-muda-terbanyak>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2024.
- Nurchayani, Putri. "Inilah Gubernur Terkaya di Sulawesi, dari Punya Koleksi Mobil Seharga Rp2 M hingga Juragan Tanah." KLIKPENDIDIKAN.ID, 2023. <https://www.klikpendidikan.id/ekonomi-bisnis/3589718378/inilah-gubernur-terkaya-di-sulawesi-dari-punya-koleksi-mobil-seharga-rp2-m-hingga-juragan-tanah?page=2>. Diakses pada tanggal 28 April 2024.
- Sinaga, Raja Malo. "Sejarah Pemilu di Indonesia, Mulai 1955 hingga 2024." detikSumut, 2024. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7172512/sejarah-pemilu-di-indonesia-mulai-1955-hingga-2024>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2024.
- Sudaina, Meiti. "Sejarah Pemilu di Indonesia:" rri.co.id, 2022. <https://www.rri.co.id/pemilu/536062/sejarah-pemilihan-umum-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2024.
- Terassulbar. "Gerindra Sulbar Andalkan Bacaleg Milenial untuk Manangkan Pileg." Terassulbar, 2023. <https://terassulbar.com/2023/05/16/gerindra-sulbar-andalkan-bacaleg-milenial-untuk-manangkan-pileg/>. Diakses pada tanggal 02 Januari 2024.